

LKIP 2025

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sepanjang tahun anggaran 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP ini menyajikan informasi transparan mengenai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sepanjang tahun 2025, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya telah berupaya maksimal untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dinamis di lapangan, laporan ini menunjukkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa capaian yang diraih pada tahun 2025 ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pegawai serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Namun, kami juga menyadari masih terdapat ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, hasil evaluasi dalam laporan ini akan menjadi landasan bagi kami untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) pada tahun anggaran mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan di masa depan.

Tambolaka, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumba Barat Daya



Ir. Yohanes F. Tuka

Pembina Utaman Muda – IV/c
NIP. 19660705 199402 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Struktur Organisasi.....	2
1.4 Sumber Daya Manusia	2
1.5 Prasarana, Sarana dan Fasilitas Penunjang.....	3
1.6 Aspek Strategis Organisasi	5
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	6
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	9
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	9
3.2 Capaian Realisasi Anggaran	10
BAB IV PENUTUP.....	13
4.1 Kesimpulan.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian dan ketahanan pangan merupakan pilar strategis dalam pembangunan daerah khusus nya Kabupaten Sumba Barat daya tidak hanya sebagai penyedia bahan pangan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang digunakan melalui capaian kinerja yang terukur.

Memasuki tahun anggaran 2025, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya menghadapi tantangan yang semakin dinamis. Perubahan iklim yang tidak menentu, fluktuasi harga komoditas pangan, hama penyakit yang menyerang tanaman serta kebutuhan akan modernisasi teknologi pertanian menuntut pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban atas perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Sumba Barat Daya periode [Tahun-Tahun].

Laporan ini menyajikan informasi secara transparan mengenai realisasi indikator kinerja utama, seperti peningkatan produktivitas hasil tani, ketersediaan pangan daerah, hingga kesejahteraan petani melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, LKjIP ini berfungsi sebagai alat kendali dan evaluasi internal untuk mengidentifikasi hambatan dalam penyaluran bantuan sarana prasarana, program diversifikasi pangan, serta penguatan cadangan pangan daerah.

Melalui laporan ini, diharapkan tercipta akuntabilitas publik yang kuat, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai efektivitas program pembangunan pertanian di [Nama Daerah]. Hasil evaluasi dalam laporan ini akan menjadi landasan utama bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada tahun anggaran 2026 demi mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba

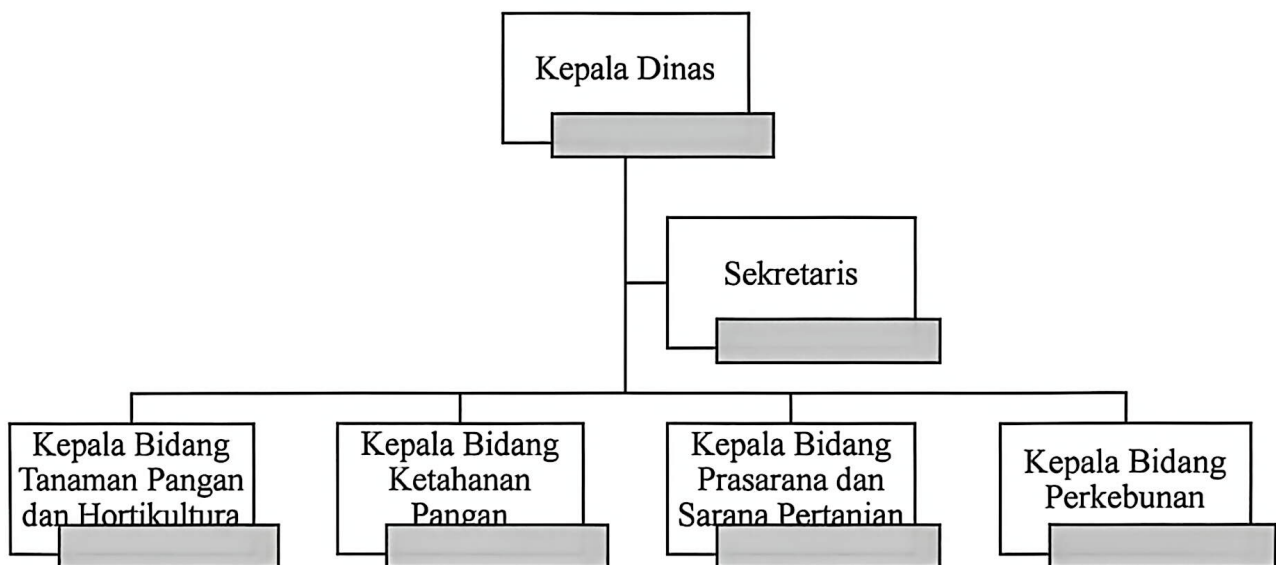
Barat Daya demi mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

1.3 Struktur Organisasi

Sesuai peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya, adalah sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset
 - Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang-Bidang :
 - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Bidang Ketahanan Pangan
 - Bidang Perkebunan
 - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan



1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Untuk mewujudkan visi misi pemerintah serta menjalankan program dan kegiatan, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki sumber daya manusia sampai dengan bulan Desember tahun 2025 sebanyak 66 orang dengan rincian PNS : 37 orang dan P3K : 29 orang

1.5 Prasarana, Sarana dan Fasilitas Penunjang

Percepatan proses pembangunan dan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya selain ditentukan oleh SDM, perlu adanya sarana prasarana dan fasilitas penunjang yang dapat membantu segala proses kerja yang dilakukan. Data sarana prasarana dan fasilitas penunjang yang tersedia pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada tabel 1.1

NO	JENIS ASET	JUMLAH UNIT
1	Tanah	
	Tanah bangunan rumah negara Gol III	21
	Tanah bangunan balai sidang/pertemuan	4
	Tanah pertanian lainnya	2
	Tanah bangunan kantor pemerintah	1
2	Kendaraan	
	Roda Empat	4
	Roda Dua	126
3	Bangunan/Gedung	
	Kantor permanen	20
	Kantor lain-lain	2
	Laboratorium lain-lain	1
	Waduk lain-lain	25
	Bendungan	1
	Bak air	7
	Rumah negara golongan III	37
4	Perangkat elektronik penunjang pelayanan	
	PC	14
	Laptop	60
	Printer	55
	LCD/projector	28
	Peralatan komputer lainnya	36
5	Meubel	
	Meja Biro	2
	Meja ¹ / ₂ Biro	41
	Meja kerja pejabat eselon III	5
	Meja kerja pejabat eselon IV	2
	Meja kerja pejabat eselon V	1

	Buffet kayu	5
	Kursi tamu	2
	Kursi besi/metal	11
	Kursi kerja pegawai non struktural	15
	Kursi kerja pejabat eselon II/III/IV	6
	Kursi putar/rapat	162
	Kursi rapat ruangan pejabat eselon II/III	8
	Lemari buku arsip	6
	Lemari kaca	4
	Lemari kayu	45
	Meja kerja kayu	396
	Meja rapat	112
	Kursi fiber glas/plastik	607
	AC 1 PK	8
	Rak penyimpanan	10
	Rak kayu	22
	Papan visual/papan nama	1
	Papan pengumuman	3
	Papan panel	10
	Filing cabinet	3
6	Alat dan Mesin Pertanian	
	Traktor besar/Hand traktor	35/590
	Pompa air	127
	RICE TRANSPLANTER	24
	Mesin giling jagung/Padi	128/21
	Hand Sprayer	155
	Mesin perontok	76
	Alat tanam jagung manual	45
	Mesin tanam jagung	11
	Mesin panen padi/jagung	10/2
	Alat tanam padi	24
	Gergaji chain saw	17
	Mesin potong	4
	Alat pengukur curah hujan	14
	Alat pengukur PH tanah	3

	Mesin bor	33
	Mesin gunting plat	19
	Traktor four wheel	1
	Sumur	3

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Dengan melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya. DPKP Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai peranan penting untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah dalam melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Dalam mendukung agenda Pembangunan Nasional dan Daerah, segala program yang terkait dengan Sektor pertanian dan menciptakan layanan Masyarakat dapat terlaksana dengan baik, termasuk upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi pertanian. DPKP Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki beberapa aspek strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya belum optimal. Hal ini dikarenakan sektor dalam PDRB belum ditingkatkan secara optimal.
2. Pembangunan pertanian dan perikanan sudah mencapai produktivitas yang bagus namun demikian pengembangan inovasi dalam pengembangan bibit yang berkualitas/bersertifikat belum optimal dalam pengembangan produktivitas. Pengembangan kearah agro industri belum terlihat demikian juga dengan perikanan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP DPKP Kabupaten Sumba Barat Daya, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan, profil dinas dan sistematika penulisan LKIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA : menguraikan tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA : menguraikan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja SKPD dan PK Tahun 2025 serta Akuntabilitas Keuangan DPKP Kabupaten Sumba Barat Daya.

BAB IV PENUTUP : Menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja, dan langkah-langkah strategis dalam percepatan pencapaian target kinerja pada masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

RKT merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029, dan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan perangkat daerah pada tahun berjalan yang mengacu pada IKU Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Berikut ini disampaikan secara umum gambaran tentang Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 - 2029 dalam kaitannya dengan penyusunan RKT dan PK tahun 2025 terutama yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran strategis.

➤ **Visi dan Misi**

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025-2029, adapun visi Kabupaten Sumba Barat Daya yakni terwujudnya kabupaten sumba barat daya yang berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya menyongsong indonesia emas 2045. Berdasarkan visi tersebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah sehingga diharapkan mampu menciptakan kemandirian dan stabilitas pangan daerah serta mewujudkan birokrasi yang profesional dengan karakterisik BerAKHLAK.

Tabel 2.1 Sasaran/Program/Kegiatan dan anggara realisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025

Sasaran/Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Sasaran	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan			
1.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				
a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		147.395.500,-	144.837.950,-	98,26%
2.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.		2.067.036.728,-	2.060.204.690,-	99,67%

3.Program Penanganan Kerawanan Pangan			
a. Kegiatan Penyusunan Pemukhtahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	75.766.250,-	74.957.500,-	98,93%
4.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			
a. Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.811.856.496,-	5.746.641.138,-	98,88%
b. Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	127.460.000,-	125.891.800,-	98,77%
5.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
a. Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	460.015.160,-	459.723.490,-	99,94%
6. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	177.276.000,-	173.829.550,-	98,05%
7.Program Penyuluhan Pertanian			
a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	2.383.799.008,-	2.087.626.640,-	87,57%

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

PK merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PK disusun berdasarkan Renja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan IKU DPKP yang sudah ditetapkan oleh Bupati. Indikator Kinerja yang diperjanjikan berupa indikator kinerja keluaran (output) dan indikator kinerja hasil (outcome) yang merupakan hasil yang dicapai dari program yang dilaksanakan tahun berjalan.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2025
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan	Presentase kelompok tani penerima sarana pendukung pertanian	3.67%
	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	79.13 %
	Peningkatan produksi tanaman pangan :	94.630
	Padi	137.511
	Jagung	
	Cakupan bina kelompok tani	9.17 %
	Cakupan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, perkebunan	75 %
	Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (%)	41 %
	Penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan	1 unit
	Penyediaan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	65 kelompok tani
	Tersedianya dokumen pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan serta kewaspadaan pangan dan gizi	2 dokumen

Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang dijabarkan dari RPJMD ke dalam Renstra diharapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja dalam mendukung pencapaian IKD. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju good governance sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam penyusunan LKIP ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Permenpanrb Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.1 Skala pengukuran capaian kinerja instansi pemerintah

Capaian	Kategori capaian
$X \geq 85\%$	Sangat berhasil
$70\% \leq X < 85\%$	Berhasil
$55\% < X < 70\%$	Cukup berhasil
$X \leq 55\%$	Belum berhasil

Tabel diatas merupakan acuan untuk menilai capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi.

Capaian indikator kinerja diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Peningkatan} = \frac{\text{Realisasi saat ini} - \text{Realisasi tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

LKIP DPKP Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya terpilih instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi/ penilaian, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya beserta target, realisasi dan capaiannya dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Capaian IKU DPKP Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2025
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan	Presentase kelompok tani penerima sarana pendukung pertanian	3.67%
	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	79.13 %
	Peningkatan produksi tanaman pangan : Padi Jagung	94.630 137.511
	Cakupan bina kelompok tani	9.17 %
	Cakupan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, perkebunan	75 %
	Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (%)	41 %
	Penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan	1 unit
	Penyediaan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	65 kelompok tani
	Tersedianya dokumen pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan serta kewaspadaan pangan dan gizi	2 dokumen

3.2 Capaian Realisasi Anggaran

Capaian realisasi anggaran adalah perbandingan antara jumlah uang yang benar-benar digunakan (realisasi) dengan jumlah uang yang direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada periode tertentu. Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap belanja program. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya.

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten sumba barat daya mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBN dan sudah mengalami perubahan final sebesar : Rp. 11.250.605.142,- dengan realisasi s/d bulan desember 2025 sebesar : Rp. 10.873.712.758,-. Pagu anggaran tersebut terdiri dari beberapa program kegiatan.

Rincian realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 serta program-program kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Realisasi anggaran DPKP Kab Sumba Barat Daya tahun 2025

Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Sasaran	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan		
1.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			
b. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	147.395.500,-	144.837.950,-	98,26%
2.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	2.067.036.728,-	2.060.204.690,-	99,67%
3.Program Penanganan Kerawanan Pangan			
b. Kegiatan Penyusunan Pemukhtahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	75.766.250,-	74.957.500,-	98,93%
4.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			
c. Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.811.856.496,-	5.746.641.138,-	98,88%
d. Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	127.460.000,-	125.891.800,-	98,77%
5.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
b. Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	460.015.160,-	459.723.490,-	99,94%
6. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	177.276.000,-	173.829.550,-	98,05%
7.Program Penyuluhan Pertanian			
b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	2.383.799.008,-	2.087.626.640,-	87,57%

Kecamatan dan Desa			
--------------------	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama tahun 2025 berjalan baik dan efektif terhadap program kegiatan. dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa presentase tertinggi terdapat pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian mencapai 99,94% dengan sub kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B. Kemudian yang berikut adalah program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat mencapai 99,67% dengan sub kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Presentase tertinggi ke-3 adalah program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian yakni mencapai 98,88% dengan sub kegiatan : pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian.

Berdasarkan program kegiatan tersebut dapat di jelaskan hasil/keluaran dari pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

- Tersediannya laporan infrastruktur yang mendukung kemandirian pangan pada masyarakat
- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal yang didukung dengan laporan kegiatan
- Tersediannya dokumen penyusunan pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan
- Terlaksananya kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian yang didukung dengan laporan kegiatan
- Terlaksananya penjaminan kemurnian dan kelestarian Sumber Daya Genetik hewan/tanaman yang didukung dengan laporan kegiatan
- Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang didukung dengan laporan kegiatan
- Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang didukung dengan laporan kegiatan
- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang didukung dengan laporan kegiatan

Di lain sisi terdapat anggaran yang tidak terealisasi sepenuhnya karena berbagai masalah dan hambatan yang terjadi. Hambatan yang sering terjadi adalah keterbatasan anggaran sehingga mengalami keterlambatan pencairan dana selain itu fasilitas kurang memadai dan kemampuan masyarakat dalam menyerap dan memahami regulasi. Namun demikian upaya pemecahan masalah dapat diatasi sehingga program kegiatan tetap berjalan sesuai perencanaan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2025 merupakan acuan dari Renstra Peangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perubahan Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Terbatasnya alokasi anggaran dan adanya refocusing anggaran yang terjadi beberapa kali sepanjang tahun anggaran 2025 berdampak cukup signifikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan.

Penyusunan LKIP didasarkan pada hasil seluruh pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025, merupakan evaluasi atas kinerja hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Demikian LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di tahun anggaran berikutnya.

Tambolaka, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Ir. Yohanes F. Tuka
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19660705 199402 1 002